

BAB VI

PENUTUP

Pertama, politik dinasti di Kabupaten Purwakarta. Dalam hal ini, dinasti yang terbentuk di Kabupaten Purwakarta adalah *by design*, karena memang model ini adalah yang paling dominan, ketika suksesi kepemimpinan Dedi Mulyadi yang dominan telah menghantarkan istrinya, Anne Ratna, untuk maju pada Pilkada 2018, menggantikan suaminya. Kemenangan Anne Ratna terbukti dan hasil suara Pilkada 2018 pun, Anne Ratna – Aming yang dominan dan diusung oleh 6 partai besar sekaligus. Berikut uraian hasil suara Pilkada 2018, yang telah memberikan kemenangan kepada Anne Ratna, sebagai dampak dari pengaruh kepemimpinan Dedi Mulyadi, dan penguatan basis-basis dukungan yang sudah dibentuk. Fenomena politik dinasti di Kabupaten Purwakarta, dibangun oleh Dedi Mulyadi awalnya begitu kuat. Faktor yang mendukung dinasti ini adalah : *Pertama*, elektabilitas Dedi Mulyadi sebagai elit sekaligus aktor politik yang sangat berpengaruh di Kabupaten Purwakarta, melalui kendaraan politik Partai Golkar, yang disisi lain Partai Golkar juga terbangun sejak lama memiliki suara dominan dalam masyarakat. *Kedua*, sosialisasi politik dan pengalaman politik Dedi Mulyadi, yang diajarkannya pada Anne Ratna (istri) dan Maula Akbar (anaknya) sejak dini. Ketika Dedi Mulyadi aktif sebagai politisi Partai Golkar. *Ketiga*, dukungan partai Golkar kepada dinasti Dedi Mulyadi, untuk mempertahankan suara partai Golkar juga berpengaruh terhadap elit yang potensial. Terdapat

beberapa identifikasi yang mengarah pada politik dinasti yang telah dibangun oleh Dedi Mulyadi, yaitu :

1. Dampak kekuasaan politik dari petahana, sehingga terbentuknya dinasti di Kabupaten Purwakarta oleh Dedi Mulyadi, tidak adanya ‘jeda’ dalam melanggengkan kekuasaan. Dimulai dari Dedi Mulyadi sebagai Bupati periode 2008-2013 dan 2013-2018, kemudian pada Pilkada 2018 mengung istrianya Anne Ratna (secara *direct*).
2. Terdapat momentum besar untuk keluarganya masuk ke wilayah politik, sehingga kapitalisasi status (jabatan) penguasa lebih mudah disosialisasikan oleh aktor (Dedi Mulyadi) dan tim suksesnya (Timses Anne Ratna maju Pilkada Purwakarta).
3. Penetapan Anne Ratna sebagai Cabup Purwakarta, melewati proses dan standarisasi yang tidak jelas dan tidak demokratis. Peralnnya, Anne Ratna sebagai kandidat yang diusung partai, dan Maula Akbar sebagai Ketua DPD (yang bahkan belum genap satu tahun di jajaran partai), artinya proses dan jenjang kaderisasi yang dibangun partai Golkar Purwakarta tidak dilalui secara tertib sehingga mengabaikan kompetensi dan pengalaman.
4. Melanjutkan tradisi kekuasaan melalui keikutsertaan Anne Ratna dan Maula Akbar, dan menduduki posisi strategis, menimbulkan kepentingan Dedi Mulyadi sebagai aktor utama yang terjaga dan akan dikembangkan oleh penerusnya, melalui program-program berkelanjutan yang ia usung pada saat menjadi pemimpin di Purwakarta. Tradisi Kesundaan juga dibawa kepada penerus dinastinya.

5. Terjadinya kolaborasi antara penguasa untuk menyatukan kekuatan politisi. Hal ini terjadi melalui pengkondisian struktural pemerintahan yang dijadikan oleh Dedi Mulyadi sebagai basis kekuatan politiknya sebagai aktor, sehingga instrumen kekuatan politiknya antara lain : partai Golkar, birokrasi, budayawan Sunda. Secara eksplisit, instrumen ini sebagai pendukung dinasti Dedi Mulyadi di Purwakarta.

Kedua, sistem kaderisasi Partai GOLKAR Kab. Purwakarta dalam pengkaderan dan distribusi kader menuju Pilkada 2018. Partai GOLKAR Purwakarta hanya melalui **sistem kaderisasi informal** saja, yaitu kaderisasi yang dilakukan melalui pendekatan yang dilakukan melalui proses kehidupan sehari-hari dalam lingkungan dan kehidupan masyarakat di area pedesaan hingga kecamatan (Pengurus Desa dan Pengurus Kecamatan) sehingga keunggulannya terlihat dan mampu bersaing, ketika melakukan pendekatan persuasif untuk mendongkrak suara partai GOLKAR kepada tokoh-tokoh berpengaruh di Purwakarta dalam menjalankan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Sehingga, kader yang terlihat potensial untuk bisa ikut aktif dalam Partai GOLKAR akan dipilih dan diikutsertakan dalam agenda-agenda penting, sehingga kedepan akan dipersiapkan untuk masuk dalam kontestasi politik dan memberikan pengaruh kinerjanya kepada publik, dan dalam proses itulah publik dapat menilai. Kaderisasi yang dilakukan Partai GOLKAR Purwakarta ketika memilih Anne Ratna sebagai Calon Bupati Purwakarta dengan berdasarkan elektabilitas Anne Ratna dalam mendongkrak suara Partai GOLKAR. Maka dalam hal ini, proses penyaringan kader masih belum massif dan maksimal. Artinya, elektabilitas kader

yang diberikan jalan untuk melanjutkan kepemimpinan sebagai kepala daerah, jika tidak melalui proses kaderisasi yang sesuai dengan AD/ART, khawatir menjadi konflik di internal partai, bahkan dikemudian hari, diharapkan ada indikasi-indikasi ketidaksesuaian *leadership*, yang berpengaruh terhadap proses berjalannya pemerintahan. Maka dari itu, menurut hemat penulis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan jika melihat bagaimana proses dan sistem kaderisasi Partai GOLKAR di Kabupaten Purwakarta, yaitu : Sistem kaderisasi partai GOLKAR Purwakarta, melalui jalur *informal*, jika fokus dan konteksnya pada penyaluran atau distribusi kader dalam kontestasi politik, Pilkada Purwakarta 2018, dengan mengusung Anne Ratna sebagai Calon Bupati. Dalam pengakderan Anne Ratna, sangat terlihat secara *informal*, dengan berjalannya kegiatan-kegiatan sosial dan kemasyarakatan Anne Ratna, sebelum di usung menjadi Bupati. Kegiatan tersebut berdampingan dengan kegiatan yang dilakukan oleh suaminya, Dedi Mulyadi, Bupati Purwakarta. Maka hal ini sangat terlihat jelas, pengakderan Anne Ratna dimulai dari pengakderan internal melalui kekerabatan atau familism antara Anne Ratna dengan Dedi Mulyadi. Sehingga, proses distribusi kader yang digunakan oleh Partai GOLKAR, adalah membranding Anne Ratna melalui kekuatan kekuasaan Dedi Mulyadi.